



**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN
AUDITBPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015)

SKRIPSI

oleh

Ulifa Izaturrohmah

NIM 110810301053

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN
AUDITBPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

Ulifa Izaturrohmah

NIM 110810301053

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtuaku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah keberhasilanku;
2. Saudara-saudaraku terima kasih atas senyuman, nasihat, dukungan dan kasih sayangmu serta terima kasih telah pernah ada dalam kehidupan ini,
3. Dosen Pembimbingku, Taufik Kurrohman, S.E., M.SA., Ak. dan Nur Hisamuddin., S.E., M. SA., Ak., yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran;
4. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang
dialami oleh suatu kaum, sehingga mereka sendiri yang berusaha merubah apa yang
mereka alami

QS. ArRa'd: 11

Akhirnya, kesemuanya itu ada akhirnya...

Achmad Sahuri S

If you can measure it, you can manage it. If you can manage it, you can achieve it.

Peter Drunker

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri,
dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

QS. Al-Isra':7

Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi!
Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.

R.A Kartini

Jangan nilai orang dari masa lalunya karena kita semua sudah tidak hidup di
sana. Semua orang bisa berubah, biarkan mereka membuktikan.

Penulis



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulifa Izaturrohmah

NIM : 110810301053

Jurusan : S1 –Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2018

Yang menyatakan,

Ulifa Izaturrohmah

NIM 110810301053

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015)

Nama Mahasiswa : Ulifa Izaturrohmah

Nomor Induk Mahasiswa : 110810301053

Jurusan : Akuntansi / S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 15 Januari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Kurrohman, S.E, M.SA,Ak.
NIP. 19820723 200501 1 002

Nur Hisamuddin, S.E, M.SA,Ak.
NIP. 19791014 200912 1 001

Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.
NIP 19780927 200112 1 002

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN
AUDITBPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015)

oleh
ULIFA IZATURROHMAH
110810301053

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Taufik Kurrohman., S.E., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing II : Nur Hisamuddin., S.E., M.SA., Ak.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDITBPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ulifa Izaturrohmah

NIM : 110810301053

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Kartika, SE., M. Sc., Ak. (.....)
NIP 19820723 200501 1 002

Sekretaris : Andriana, SE., M.Sc. (.....)
NIP 19710727 199512 1 001

Anggota : Moch. Shultoni., SE., M. SA., Ak. (.....)
NIP 19710217 200003 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak.
NIP 197107271995121001

Ulifa Izaturrohmah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2015 meliputi karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran daerah, leverage, jumlah anggota legislatif, kekayaan daerah, ketergantungan daerah pada pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK, kinerja pemerintah daerah provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dan dianalisis dengan regresi Logistik. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh yang tidak signifikan karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran daerah, leverage, jumlah anggota legislatif, kekayaan daerah, ketergantungan daerah pada pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi Jawa Timur tahun 2015.

Kata kunci: ukuran daerah, leverage, jumlah anggota legislatif, kekayaan daerah, ketergantungan daerah pada pusat, belanja daerah dan temuan audit, kinerja keuangan

Ulifa Izaturrohmah

Department of Accountancy, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the characteristics of local government and audit findings as well as its impact on the financial performance of regency / city government in East Java. Type of research used in the research is hypothesis testing (hypothesis testing). The observation period conducted in 2015 includes the characteristics of local government as measured by area size, leverage, number of legislative members, regional wealth, regional dependence on central, regional spending and BPK audit findings, performance of East Java provincial government. Data collection used secondary data and analyzed by logistic regression. The result of this study is the influence that is not significant to the characteristics of the local government as measured by the size of the region, the leverage, the number of legislative members, the regional wealth, the regional dependence on the central, regional spending and BPK audit findings affect the performance of East Java provincial government in 2015.

Keywords: *size of area, leverage, number of legislative members, regional wealth, regional dependence on central, regional spending and audit findings, financial performance.*

RINGKASAN

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Ulifa Izaturrohmah, 110810301053; 2018; 80 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomid dan Bisnis Universitas Jember.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasmo, 2002:185). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Hendriyadi, 2011:35). Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Penelitian yang dilakukan Mustikarani dan Fitrasari (2012), menguji pengaruh karakteristik pemda dengan proksi variabel ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemerintah daerah di Indonesia, Kusumawardhani (2012), menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dengan proksi variabel *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, rasio *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah ternyata tidak

serta merta dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Idealnya kebijakan otonomi daerah dapat mendorong kinerja keuangan pemprov Jatim makin lebih baik dan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini masih banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat sehingga belum mampu mandiri dari segi keuangan.

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran daerah, leverage, Jumlah anggota legislatif, kekayaan daerah, ketergantungan daerah pada pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi Jawa Timur tahun 2015. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data tertulis yang relevan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil analisa statistik variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 3.075, variabel ukuran pemerintah daerah bernilai positif artinya berbanding lurus terhadap kinerja keuangan daerah sehingga apabila ukuran pemerintah daerah mengalami kenaikan maka kinerja keuangan cenderung surplus atau meningkat. Variabel leverage sebesar 47.858, variabel *leverage* bernilai negatif artinya berbanding terbalik terhadap kinerja keuangan daerah sehingga apabila *leverage* mengalami kenaikan maka kinerja keuangan cenderung difisit atau menurun. Variabel jumlah anggota legislatif sebesar 0,093 variabel jumlah anggota legislatif bernilai negatif artinya berbanding terbalik terhadap kinerja keuangan daerah sehingga apabila jumlah anggota legislatif mengalami kenaikan maka kinerja keuangan cenderung difisit atau menurun. Variabel kekayaan daerah sebesar 12,339 variabel kekayaan daerah bernilai negatif artinya berbanding terbalik terhadap kinerja keuangan daerah sehingga apabila kekayaan daerah mengalami kenaikan maka kinerja keuangan cenderung difisit atau menurun. Variabel tingkat ketergantungan dengan pusat sebesar 10,599 variabel tingkat ketergantungan dengan pusat bernilai negatif artinya berbanding terbalik terhadap kinerja keuangan daerah sehingga apabila

tingkat ketergantungan dengan pusat tinggi maka kinerja keuangan cenderung difisit atau menurun. Variabel belanja daerah sebesar 0,000 variabel kekayaan daerah bernilai positif artinya berbanding lurus terhadap kinerja keuangan daerah sehingga apabila belanja daerah mengalami kenaikan maka kinerja keuangan cenderung meningkat. Variabel temuan audit sebesar 23,381 variabel temuan audit bernilai negatif artinya berbanding terbalik terhadap kinerja keuangan daerah sehingga apabila temuan audit meningkat maka kinerja keuangan cenderung difisit atau menurun.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis statistik disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dengan proksi variabel *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, rasio *leveraged* dan temuan audit BPK berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini melibatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.. dan Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
3. Taufik Kurrohman, S.E., M.SA, Ak. Dan Nur Hisamuddin, S.E., M. SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini,
4. Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M. SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa,
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember,
6. Kedua orang tuaku tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
7. Orang terkasih yang dengan setia memberikan semangat dan dukungan

8. Saudara-saudaraku terima kasih untuk nasihat dan kasih sayangmu serta terima kasih telah pernah ada dalam kehidupan ini, *our childhood will remain forever*,
9. Sahabat-sahabatku di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Husnia Novia Yuhaida, Reza Alvionita, Kartika Chandra Priliana, Dodo Reza Sukma, Kokoh Mardiyanto, Mevina Marsella Lausani, Novita Dewi Fandiana, dan Taufiqurrahman Hidayatullah terima kasih atas semangat, dukungan, dan keceriaan yang telah mengisi kehidupanku dari awal kuliah sampai sekarang. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses,
10. Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 2013, terima kasih atas semua waktu dan pengalaman selama ini. *We're not superman, but we're superteam*,
11. Teman-teman Akuntansi 2011, khususnya teman-teman diskusi untuk ujian skripsi dan pendadaran, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini,
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

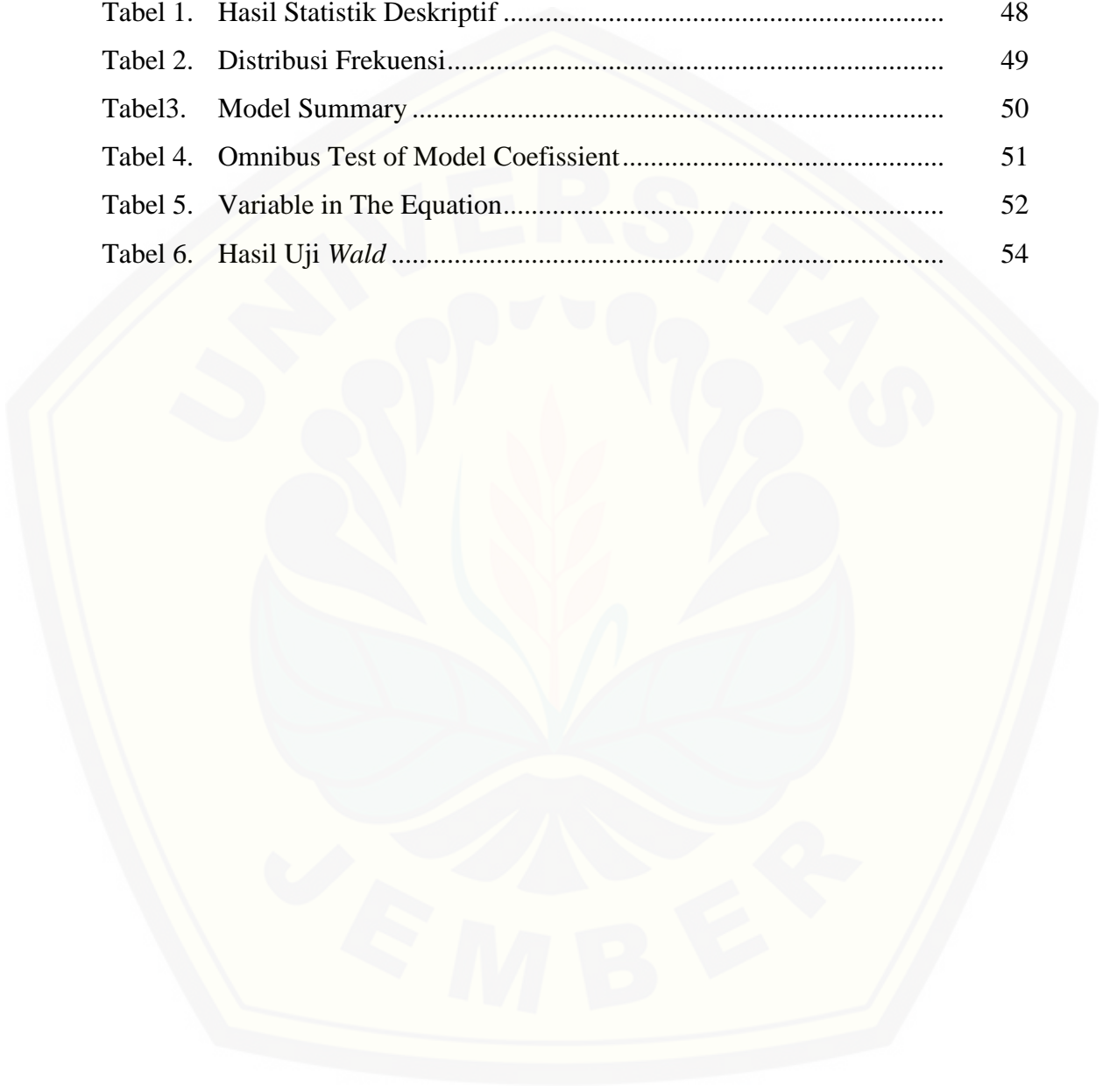
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Agensi (Agency Theory)	7
2.2 Karakteristik Pemerintah Daerah	9
2.2.1 Ukuran Daerah.....	10
2.2.2 <i>Leverage</i>	11
2.2.3 Jumlah Anggota Legislatif	12
2.2.4 Tingkat Kekayaan Daerah	13
2.2.5 Tingkat Ketergantungan pada Pusat	15

2.2.6 Belanja Daerah	15
2.3 Temuan Audit BPK.....	17
2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20
2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
2.6 Penelitian Terdahulu	27
2.7 Kerangka Konseptual	35
2.8 Pengembangan Hipotesis	36
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Populasi dan Sampel Data	43
3.3 Data dan Sumber Data.....	43
3.4 Objek Penelitian	44
3.5 Definisi Operasional	44
3.5.1 Variabel Independen.....	44
3.5.2 Variabel Dependen	47
3.6 Metode dan Hasil Data.....	47
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	47
3.6.2 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik.....	47
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi	48
3.6.4 Analisis Regresi Logistik	49
3.6.5 Uji Hipotesis.....	51
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	53
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Deskripsi Statistik	55
4.1.2 Hasil Analisis Data.....	58
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	65
4.2.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	65

4.2.2Pengaruh Rasio <i>Leverage</i> Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	65
4.2.3Pengaruh Jumlah Anggota Legislatif Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	67
4.2.4Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	67
4.2.5Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pusat terhadap Kinerja Keuangan Daerah	69
4.2.6Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	70
4.2.7Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah	70
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif	48
Tabel 2. Distribusi Frekuensi.....	49
Tabel3. Model Summary	50
Tabel 4. Omnibus Test of Model Coeffisient.....	51
Tabel 5. Variable in The Equation.....	52
Tabel 6. Hasil Uji <i>Wald</i>	54



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Era reformasi telah menghasilkan dua Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah. Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengusung semangat demokratisasi pemerintahan daerah serta menjadikan desentralisasi sebagai instrumen demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sejatinya merupakan perbaikan dari UU Nomor 22 Tahun 1999. UU Nomor 32 Tahun 2004 berupaya mengawinkan semangat demokrasi dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam pemerintahan daerah (Sholahudin, 2013).

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*) (Mardiasmo, 2002:185).

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu

pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah (Kuncoro dalam Rudiyanto, 2015:4).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Hendriyadi, 2011:35). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Indikator kinerja keuangan daerah dapat dijadikan evaluasi dan sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004:150-158).

Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum,

2012). Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah, baik pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota, wajib membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil laporan keuangan pemerintah yang telah dibuat nantinya harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, baru kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Penelitian tentang pengaruh karakteristik Pemda dilakukan Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, dan Brown (2010) menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Sumarjo (2010) mengaitkan dengan kinerja keuangan, sedangkan Purba (2006), Rustiono (2008) dan Ahmad (2011) mengaitkan karakteristik Pemda dengan kinerja ekonomi makro. Penelitian yang dilakukan Mustikarani dan Fitrasari (2012), menguji pengaruh karakteristik pemda dengan proksi variabel ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemerintah daerah di Indonesia, Kusumawardhani (2012), menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dengan proksi variabel *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, rasio *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Di Jawa Timur, meski berbagai program pengentasan kemiskinan digalakkan dengan anggaran cukup besar, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Hal ini diperkuat dengan fakta masih sulitnya masyarakat miskin mendapatkan kebutuhan dan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2003, manajemen pengelolaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budget*) telah menjadi sistem baru yang secara resmi diatur dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hingga saat ini sistem tersebut telah diadopsi oleh pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi hingga ditingkat kabupaten/kota. Seharusnya proses penyusunan APBD di kabupaten/kota dan provinsi mengalami kemajuan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator kemajuan yang seharusnya terlihat adalah bagaimana seharusnya pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD) membuka ruang publik, untuk menjamin transparansi, partisipasi dan akuntabilitas kebijakan publik dalam hal proses penyusunan anggaran. Jika ditinjau dari sisi pendapatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 75% yang berasal dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah secara langsung merupakan sumber yang diperoleh dari uang masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah ternyata tidak serta merta dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Idealnya kebijakan otonomi daerah dapat mendorong kinerja keuangan pemprov Jawa Timur makin lebih baik dan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini masih banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat sehingga belum mampu mandiri dari segi keuangan. Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 86,77%. Daerah dengan rata-rata ketergantungan fiskal tertinggi yaitu Kabupaten Ngawi dengan ketergantungan fiskal 94,65%. Rata-rata ketergantungan fiskal yang terendah yaitu Kota Surabaya

yaitu sebesar 16,24%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah daerah di Jawa Timur masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hanya satu kota yaitu Surabaya yang memiliki ketergantungan fiskal rendah atau bisa dikatakan telah memiliki kemandirian dalam hal keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari desentralisasi yaitu agar daerah dapat mandiri sesungguhnya belum tercapai dikarenakan masih banyak daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Jika suatu daerah masih belum mandiri dalam arti memiliki ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat diharapkan mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien agar menambah jumlah pendapatan daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut maka perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam tentang karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- a. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- b. Apakah rasio leverage berpengaruh terhadap kinerja pemerintah?
- c. Apakah jumlah anggota legislatif daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- d. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- e. Apakah tingkat ketergantungan daerah pada pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- f. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
- g. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh ukuran daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- b. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh rasio leverage terhadap kinerja pemerintah daerah.
- c. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh jumlah anggota legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
- d. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- e. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah pada pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.
- f. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- g. Untuk memahami dan menganalisis pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Secara teoritis untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada di setiap lingkungan Pemerintah Daerah serta menganalisis pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.
- b. Secara Praktis untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang pentingnya kesadaran akan pencapaian suatu kinerja baik secara finansial maupun non finansial sebagai dampak karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Povinsi Jawa Timur.

BAB 2. TINJUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah sebuah teori yang membahas mengenai hubungan antara dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Teori agensi dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan. Hubungan keagenan lebih sering dibahas dalam konteks manajemen perusahaan yang berorientasi bisnis. Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi.

Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi, yaitu: (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) dan (3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak menguntungkan kepentingan pribadinya. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan

psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Pada organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan pusat dan daerah, secara sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikkan. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Di sana terjadi kekuasaan yang independen (meski tidak 100 persen independen) dalam pemerintahan daerah.

Pada hakikatnya, tujuan adanya organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dan Pengalokasian sumber daya ini pemerintah pusat tidak dapat melakukannya sendirian, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya tersebut dikarenakan pemerintah pusat juga tidak memiliki dana yang cukup untuk alokasi sumber daya. Oleh karena adanya keterbatasan dana tersebut, maka pembuatan anggaran diperlukan sebagai mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya.

Pada proses penyusunan dan perubahan anggaran, muncul dua perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif dan legislatif dengan eksekutif. Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah principal (Halim dan Abdullah, 2006). Pihak legislatif dalam hubungan dengan rakyat, adalah agen yang membela kepentingan rakyat (prinsipal), akan tetapi, tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Hal inilah yang sering menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumberdaya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan *self-interest* para pihak legislatif tersebut. Teori keagenan ini banyak memberikan dampak negatif yang berupa perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*). Hal ini terjadi tidak lepas dari kaitannya dengan masalah asimetri informasi. Pihak agen memiliki informasi keuangan

yang lebih banyak daripada pihak prinsipal. Di sisi lain, pihak prinsipal pun dapat menggunakan kewenangannya/kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*).

2.2 Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Poerwadarminta, 2006). Dengan demikian, karakteristik daerah memiliki pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat terlihat dengan adanya fakta bahwa pemerintah daerah masih mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pada penelitian-penelitian, karakteristik pemerintahan diproksikan dalam item-item yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Patrick (2007) telah melakukan penelitian dengan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Penelitian tersebut diterapkan pada daerah Pennsylvania, Amerika Serikat. Karakteristik dalam penelitian tersebut terdiri dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal. Suhardjanto,*et al.* (2010) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan karakteristik daerah menggunakan model yang sama dengan Patrick (2007).

Penelitian yang dilakukan Suhardjanto,*et al.* (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah di mana struktur organisasi diproksikan dengan *size daerah*, *wealth*, *functional differentiation*, *age*, dan latar belakang pendidikan kepala daerah. Sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan *municipality debt financing* dan *intergovernmental revenue*. Hasibuan (2009) dalam Sumarjo (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor pemerintahan, di

mana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Poerwadarminta, 2006). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Choiriyah (2010) menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, kesejahteraan, *functional differentiation*, umur daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, rasio *leverage* daerah, dan *intergovernmental revenue* (Suhardjanto dkk, 2010).

2.2.1 Ukuran Daerah

Penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan, besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Pemerintah daerah (Pemerintah daerah) yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerja.

2.2.2 *Leverage*

Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2009). Didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang (Sesotyaningtyas, 2012).

Utang daerah atau pinjaman daerah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri dan/atau penerusan pinjaman luar negeri.
2. Pemerintah daerah lain.
3. Lembaga keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga keuangan bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* yang besar maka diprediksi memiliki tingkat resiko yang besar. Menurut Choiriyah (2010), *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat terlihat tingkat resiko tidak tertagihnya utang (Perwitasari, 2010). Lebih lanjut, Perwitasari (2010), mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.

2.2.3 Jumlah Anggota Legislatif

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD melakukan fungsi pengawasan dengan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Anggota-anggota DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung. Ketentuan ini menyiratkan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam struktur pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD mempunyai karakteristik representatif yang bertugas melakukan fungsi monitoring dan dapat dianggap setara dengan board dalam governance berdasarkan konsep keagenan (Sutaryo, 2013).

Pada sektor swasta, ukuran board dalam struktur manajerial terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di Indonesia, struktur dewan dipisah antara dewan direksi dan dewan komisaris dimana yang melaksanakan fungsi monitoring adalah dewan komisaris. Yu (2006) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota dewan komisaris maka tindak kecurangan semakin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam

menjalankan perannya. Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) sebelumnya juga menemukan hasil yang sama dengan Yu (2006).

Penelitian lain oleh Benhart dan Rosenstein (1998) menemukan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Banyaknya anggota dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Dari kemiripan fungsi dan posisi antara dewan komisaris dan DPRD dalam struktur pemerintahan, diharapkan banyaknya jumlah anggota DPRD dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga didukung dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Sutaryo dan Jakawinarna (2013) yang menemukan bahwa ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kusumawardani (2012) menjelaskan semakin banyak anggota legislatif maka semakin ringan dan mudah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, menurut Sutaryo dan Jakawinarna (2013), semakin banyak anggota legislatif maka semakin banyak kontribusi pemikiran maupun solusi dalam menyelesaikan suatu masalah dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik.

2.2.4 Tingkat Kekayaan Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

2.2.5 Tingkat Ketergantungan pada Pusat

Tingkat ketergantungan pada pusat pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Indararti (2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi antara DAU dengan kinerja keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian Virgasari (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2.6 Belanja Daerah

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti

peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi nilai kinerja Pemerintah Daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Meliputi :

- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa.
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal.
- f. Bunga.
- g. Subsidi.
- h. Hibah.
- i. Bantuan Sosial.
- j. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- k. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat atau daerah.

2.3 Temuan Audit BPK

Salah satu unsur untuk mewujudkan akuntabilitas pada pemerintah daerah adalah transparansi keuangan negara. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan menggunakan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Implementasi konsep transparansi pada pemerintah daerah dilakukan dengan cara menyusun LKPD (Suyanto, 2014), untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut maka dilakukan audit oleh BPK RI yang hasilnya dituangkan dalam LHP atas LKPD. Berdasarkan Keputusan BPK RI No.5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan, temuan pemeriksaan terdiri dari Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Temuan Ketidapatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta Temuan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) (BPK,2011).

Undang-Undang No.15 tahun 2004 (UU No.15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Berdasarkan UU No. 15/2004 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan
 - a. Pencatatan tidak/belum dilakukan dengan akurat.
 - b. Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
 - c. Keterlambatan penyampaian laporan.
 - d. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - a. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
 - b. Kegiatan yang tidak sesuai aturan.
 - c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.
 - e. Pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat.
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
 - a. Tidak Memiliki Standar Prosedur Operasional yang formal.
 - b. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal.
 - c. Tidak adanya satuan pengawasan intern yang ada tidak mematuhi.
 - d. Satuan pengawasan intern yang ada tidak mematuhi.
 - e. Tidak ada pemisahan tugas.

Sedangkan untuk rincian dari lima klasifikasi temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi temuan kerugian negara/indikasi kerugian negara
 - a. Belanja fiktif.
 - b. Tuntutan Perbendaharaan.
 - c. Kemahalan harga (mark up): pengadaan barang/jasa oleh entitas yang berbeda dari penyedia barang dan jasa yang sama pada waktu dan tempat yang sama.
 - d. Kelebihan Pembayaran.
 - e. Kekurangan volume pekerjaan.
 - f. Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda.
 - g. Indikasi tindak pidana korupsi.
 - h. Pengadaan barang/jasa fiktif.

- i. Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak (spesifikasi).
 - j. Rekanan penyedia barang/jasa wanprestasi.
 - k. Aset dikuasai pihak lain.
 - l. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
2. Klasifikasi Temuan Kekurangan Penerimaan.
- a. Pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/denda keterlambatan pekerjaan belum atau terlambat dipungut/diseter.
 - b. Penggunaan langsung PNPB/Pendapatan (Retribusi, kapitasi ASKES, dll)
 - c. Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan akhir tahun anggaran tidak diseter/belum ke kas negara/kas daerah.
 - d. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
3. Klasifikasi Temuan Administrasi.
- a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau akurat.
 - b. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah).
 - c. Proses pengadaan barang/jasa/lelang performa.
 - d. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak/Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
 - e. Mekanisme pemungutan dan penyeteroran PNPB tidak sesuai ketentuan.
 - f. Pengalihan anggaran antara MAK (Mata Anggaran Keluaran) / pengeluaran tidak sah.
 - g. Entitas terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
 - h. Salah pembebanan anggaran.
 - i. Kebijakan tidak tepat.
 - j. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi objek yang diperiksa.
 - k. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah (Aset belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, penghapusan tidak sesuai ketentuan).
 - l. Penyimpangan dari peraturan tentang pedoman pelaksanaan APBN/APBD.
4. Klasifikasi Temuan Kehematan dan Efisiensi
- a. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan
 - b. Pengadaan harga standar tidak realistis.

- c. Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar.
 - d. Ketidakhematan/pemborosan keuangan negara.
5. Klasifikasi Temuan Efektivitas.
- a. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan.
 - b. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - c. Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan.
 - d. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 - e. Pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Bernstein (2000) dalam Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemerintah daerah dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemerintah daerah tersebut.

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Suyono, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelola sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen mengetahui kondisi entitas tersebut. Yusuf (2010) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca). Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *financial* pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik (Surepno, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai (Bastian, 2006).

Bastian (2006) menyebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam pemerintah daerah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya – sumber daya terpercaya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya *financial*;
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya;
3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya;
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi *financial* suatu entitas dan perubahan didalamnya;
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi dan pencapaian tujuan.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai (Bastian, 2006). Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:

1. Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau masa depan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materialitas dan dapat diandalkan pemakainya.

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan, maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan yaitu meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 2005 laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komprehensif.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 Tahun 2005). Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 1) Kas dan setara kas 2) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang 3) Piutang pajak dan bukan pajak 4) Persediaan 5) Aset tetap 6) Kewajiban jangka panjang dan jangka pendek 7) Ekuitas

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam satu periode akuntansi dan saldo kas dan saldo setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (PP RI No. 24 Tahun 2005).

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Peranan pelaporan keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 21 dan 22 (PP No. 24/2005) menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan *good governance* (Sadjiarto, 2000). Hal ini dikarenakan melalui laporan keuangan maka unsur akuntabilitas dalam mencapai *good governance* dapat terpenuhi (Wiratraman, 2009). Pada perkembangannya, usaha pemerintah dalam mencapai *good governance* masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari fenomena yang terjadi pada tahun 2004 dimana terjadi korupsi secara massal dengan dalih studi banding, proyek penggusuran, dan manipulasi anggaran (Wiratraman, 2009). Belakangan ini, berkembanglah tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas yang tidak hanya sekedar dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, namun masyarakat menginginkan adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah (Sadjiarto, 2000).

2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan suatu pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Azhar, 2008). Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordriawan dan Hertianti, 2011).

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data

pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Akuntabilitas bukan sekadar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2002). Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2004 - 2009, Anwar Nasution. Beliau menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang masih buruk berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sesuatu yang memang penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu kunci sukses dari pembaruan dalam sektor publik (Greiling, 2005).

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik di dalam maupun luar negeri. Bruijn (2002) dan Greiling (2005) melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah di Jerman. Di Indonesia, penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Hamzah (2008) dalam Sumarjo (2010) yang meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Kinerja atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2002).

Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan melalui analisis rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, dan efektivitas. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan

daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2002).

Pada dasarnya terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan Anggaran Kinerja merupakan instrumen yang dipakai Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada dibawah kendali daerah selaku manager eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:19). Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Surplus/Defisit APBD

Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut (PP 58 Tahun 2005) yaitu: surplus/defisit = pendapatan daerah-belanja daerah, sedangkan menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006 yaitu: surplus/defisit = (pendapatan-belanja) + silpa + pencairan dana cadangan.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

DDF pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti (i) PAD terhadap total penerimaan daerah, (ii) Rasio Hasil Bagi Pajak dan Bukan Pajak daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD (halim, 2004)

3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemandirian Keuangan Daerah adalah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004)

4. Upaya Fiskal/Posisi Fiskal

Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar disuatu daerah. salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak (Halim, 2004)

5. Analisis Efektifitas (CLR)

Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004)

6. Indeks Kinerja Pajak dan Retibusi Daerah

Indeks Kinerja Pajak dan Retibusi Daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak/retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

7. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

8. Kemampuan Pinjaman Daerah (DSCR)

Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Lin, *et. al.* (2010) menguji pengaruh kekayaan daerah terhadap indeks kinerja ekonomi di Cina. Dengan hasil Tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui nilai PAD terhadap total pendapatan Pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah daerah kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 90%. Dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin tinggi skor kinerja daerah tersebut.

Penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah) dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dengan menggunakan beberapa metode regresi untuk Pemerintah Daerah untuk tahun 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemerintah daerah dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah.

Rohman dan Nugroho (2012) meneliti mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening, di mana penelitiannya mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Florida (2007) dengan objek penelitiannya adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari realisasi Anggaran Laporan Pendapatan dan Belanja (APBN) dari kabupaten kota di Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan, belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Julitawati, *et al* (2012) menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah digunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian Wenny (2012) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009 yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Sumarjo (2010) menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah, ukuran (*size*) legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental Revenue*. Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

No	Judul	Peneliti	Tahun	Metode Penelitian	Hasil
1	Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Indeks Kinerja Ekonomi di Cina.	Lin, <i>et al</i>	2010	analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda	Tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui nilai PAD terhadap total pendapatan Pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemerintah daerah kabupaten/kota pada tingkat keyakinan 90%. Dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin tinggi skor kinerja daerah

					tersebut.
2	Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Kusumawardani	2012	analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda	<i>Size</i> , kemakmuran, ukuran legislatif, <i>leverage</i> secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel <i>size</i> dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
3	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di	Mustikarini dan Fitriyani	2012	analisis kuantitatif	Karakteristik suatu pemerintah daerah (ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja daerah) dan temuan audit BPK memiliki pengaruh

	<p>Indonesia Tahun Anggaran 2007</p>			<p>terhadap skor kinerja Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dengan menggunakan beberapa metode regresi untuk Pemerintah Daerah untuk tahun 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemerintah daerah dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah sedangkan variabel</p>
--	--	--	--	--

					belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah.
4	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai Variabel Intervening	Rohman dan Nugroho	2012	analisis kuantitatif	Belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan, belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah.
5	pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.	Juliawati, <i>et al</i>	2012	analisis kuantitatif	Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
6	pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial	Wenny	2012	analisis kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap

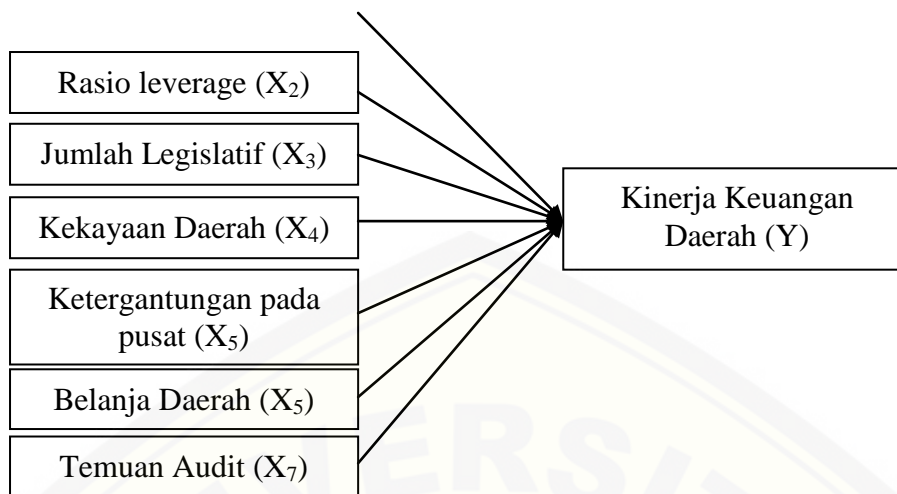
	mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan				kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)	Sumarjo	2010	analisis kuantitatif	ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (<i>wealth</i>) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan

					<p>Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p><i>Intergovernmental revenue</i> juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--	--	--

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah erat kaitannya dengan karakteristik yang dimiliki daerah serta temuan audit oleh BPK. Mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ukuran Daerah (X_1)



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.8 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran daerah adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Patrick, 2007). Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik. Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Hal ini tentu berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawardani, (2012), serta penelitian Mustikarini, dan Fitriasari (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar ukuran daerah yang dinilai dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah, diharapkan akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sudarsana (2013) menjelaskan bahwa tujuan utama dari program kerja Pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja keuangan Pemerintah daerah

tersebut. Ukuran (*size*) merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi (Patrick, 2007). Terdapat bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi didalam suatu daerah dapat mempengaruhi struktur daerah. Organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007; Cohen dan Kaimenakis, 2008). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang akandiuji adalah:

H₁: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

b. Pengaruh Rasio *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan

Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak terbayarkannya suatu utang Almilia dan Retrinasari (2007) dalam Sumarjo (2010). Semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai operasioanl melalui dana internal. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk kinerja keuangan entitas tersebut atau sebaliknya (Sumarjo, 2010). *Leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal. Perwitasari (2010) telah melakukan penelitian pada sektor publik, hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja keuangan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana dari pihak eksternal. Beberapa penelitian mengenai *leverage* telah dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) dan Perwitasari (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Weill (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *leveragedan* pengukuran kinerja keuangan suatu entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) 37 mengenai *leverage* juga menunjukkan hal yang serupa dengan penelitian Weill (2003), yaitu

leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ :Rasio *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

c. Pengaruh Jumlah Anggota Legislatif terhadap Kinerja Keuangan

Kusumawardani (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara logika semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sumarjo (2010) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya. Gilligan dan Matsusaka (2001) menggunakan *legislature size* sebagai variabel independen dalam menguji pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal di Pemerintah daerah Amerika Serikat pada awal pertengahan abad ke-20. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *legislature size* secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Dalam pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Suhardjantodan Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib. Dengan demikian, semakin banyak jumlah anggota DPRD diharapkan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah daerah sehingga terdapat peningkatan pada pengungkapan LKPD. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H₃: Tingkat jumlah anggota legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

d. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja keuangan

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Saragih (2003) dalam Sumarjo (2010) menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang juga mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tentang PAD pernah dilakukan oleh Indrarti (2011) dan Virgasari (2009) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan kinerja keuangan daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar total PAD maka dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai PAD, salah satunya dilakukan oleh Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap jumlah belanja modal pemerintah daerah. Belanja modal ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H₄ : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

e. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Indararti (2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi antara DAU dengan kinerja keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian Virgasari (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sudarsana (2013) menyatakan semakin besarnya penerimaan DAU oleh suatu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga kinerja keuangan Pemerintah daerah juga semakin meningkat. Dari uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

f. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja keuangan Pemerintah daerah

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan

wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi nilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Mustikarini, dan Fitriyani (2012) menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Dari uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₆: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

g. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja keuangan

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan Pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja keuangan suatu Pemerintah daerah (Sudarsana, 2013). Temuan audit BPK yaitu berupa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka

semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah itu. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis terakhir untuk penelitian ini yaitu:

H₇: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan memperoleh data dalam bentuk angka. Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan), penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif karena menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih atau dengan kata lain bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:89). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2013:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran daerah, *leverage*, jumlah anggota legislatif, kekayaan daerah, ketergantungan daerah pada pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Menurut Sekaran (2000), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variabel atau lebih.

3.2 Populasi dan Sampel Data

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015. Adapun Pemerintah daerah tersebut terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten serta 9 Pemerintah Kota.

3.3 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Alasan penggunaan data sekunder dengan

pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta data non keuangan, seperti jumlah anggota DPRD.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Data LKPD yang digunakan antara lain: data neraca untuk mendapatkan total aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, belanja daerah dan total realisasi anggaran pendapatan, surplus/defisit anggaran didapatkan melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Sedangkan data non keuangan diperoleh dari website resmi masing-masing pemerintah daerah. Sumber data untuk temuan audit BPK didapatkan dari Ikhtisar Pemeriksaan semester I dan II tahun 2015 pada website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id/>.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015.

3.5 Definisi Operasional

Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda.

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah

daerah, *leverage*, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, dan temuan audit.

a. Ukuran Pemerintah Daerah (*size*)

Ukuran (*size*) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi (Damanpour, 1991 dalam Suhardjanto, *et al*, 2011). Penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Martani dan Zaelani (2011) serta Sumarjo (2010) ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset seperti pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing Pemda berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di Ln kan.

b. *Leverage*

Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan debt to equity dalam mengukur *leverage*. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin buruk kinerja. Sedangkan semakin rendah *leverage* maka semakin baik kinerja. Maka pada penelitian ini variabel *leverage* diukur dengan rumus:

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

c. Jumlah anggota legislatif

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat atas kinerja keuangannya. Pada era otonomi ini, peranan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan sesuatu yang sangat penting (Winarna dan Murni, 2007). Penelitian yang dilakukan Gilligan dan Matsusaka (2001) menggunakan jumlah total anggota DPRD dalam mengukur ukuran legislatif.

d. Kekayaan Daerah

Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

e. Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Variabel tingkat ketergantungan diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan dengan Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total pendapatan}}$$

f. Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diukur dari tingkat kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah akan menunjukkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai dari belanja daerah dapat diperoleh dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi belanja daerah di suatu daerah menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak efisien.

g. Temuan Audit BPK

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012), temuan audit BPK diukur dengan temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), variabel temuan audit BPK penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Temuan Audit} = \frac{\text{Temuan Audit (rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan analisis surplus/defisit APBD (Mardiasmo, 2002:19). Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan menurut (PP 58 Tahun 2005) yaitu: surplus/defisit = pendapatan daerah-belanja daerah, sedangkan menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006 yaitu: surplus/defisit = (pendapatan-belanja) + silpa + pencairan dana cadangan.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan dan mengetahui gambaran atau deskripsi dari masing-masing variabel tanpa membuat kesimpulan untuk digeneralisasikan. Menurut Sugiyono (2015:199) statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang telah berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif menjelaskan besarnya nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum untuk variabel-variabel kecuali variabel *dummy*. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.6.2 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik

Uji kelayakan model regresi (*goodness of fit test*) pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. *Goodness of fit test* akan membandingkan dua distribusi data yakni yang teoritis (frekuensi harapan) dan yang sesuai kenyataan (frekuensi observasi) (Santoso, 2012:77). Uji kelayakan model regresi (*goodness of fit test*) dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* digunakan untuk melihat apakah data empiris cocok atau tidak dengan model atau dengan kata lain diharapkan tidak ada perbedaan antara data empiris dengan model. Terdapat hipotesis pada uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sebagai berikut:

Hipotesis:

H_0 = tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai observasi dengan prediksi model (sehingga dapat dikatakan *fit*)

H_1 = terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai observasi dengan prediksi model

Dasar pengambilan keputusannya yaitu (Ghozali, 2011:341) :

1. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan data dengan nilai observasinya sehingga *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya.
2. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) maka hipotesis nol tidak dapat ditolak (diterima) dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan *Nagelkerke R Square*. Menurut Ghozali (2011:341) *Cox and Nagel karke R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *RSquare* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. *Nagelkerke R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell's* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox dan Snell's R²* dengan nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke's R²* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R²* pada *multiple regression*. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Semakin tinggi nilai *Nagelkerke's R²* maka semakin besar variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dalam model regresi.

3.6.4 Analisis Regresi Logistik

Regresi logistik merupakan pendekatan matematikal modeling yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan dari beberapa X variabel untuk sebuah dikotomi dependen variabel. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan estimasi terbaik dari persimoni, dimana model dapat menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan suatu set dari independen variabel (Latan, 2014:202). Pada dasarnya terdapat 3 model regresi logistik diantaranya yaitu 1). regresi logistik biner (*binary logistic regression model*) menurut Latan (2014:2016), *binary logistic* digunakan ketika dependen variabel adalah dikotomi sedangkan variabel independen variabelnya dapat berbagai tipe. Kata *binary* dan binomial dapat dipertukarkan, dimana dependen variabel mempunyai dua nilai yaitu 0 dan 1, 2) regresi logistik multinomial (*multinomial logistic regression*) menurut Gudono (2015:197) regresi multinomial adalah regresi logistik dimana variabel dependennya bersifat nominal dan memiliki lebih dari dua kategori (polikotomus), 3) regresi logistik ordinal (*ordinal logistic regression*) menurut

Ghozali (2011:357) regresi logistik ordinal digunakan jika kategori variabel dependennya berupa ordinal atau peringkat. Analisis regresi logistik mensyaratkan beberapa asumsi mengenai sifat-sifat datanya yaitu: 1) variabel dependen tidak diasumsikan harus berdistribusi normal, karena menghasilkan hasil analisis yang lebih stabil jika predictor-prediktor mempunyai distribusi normal multivariat, (2) variabel dependen tidak membutuhkan homoskedastisitas untuk setiap level dari independen variabel, sehingga *homogeneity variance* tidak diperlukan. Dengan kata lain, varian tidak dibutuhkansama didalam setiap kategori, 3) normal distribusi error tidak diasumsikan, 4) regresi logistik tidak mensyaratkan independen atau predictor variabel harus interval (Latan, 2014:209-210).

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*). Alasan menggunakan analisis regresi logistik karena variabel dependen merupakan variabel *dummy* dan bersifat dikotomis atau kategorikal yakni keputusan kredit diterima atau ditolak. Asumsi distribusi normal tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik). Penelitian ini menggunakan regresi logistik biner karena variabel dependen kinerja keuangan daerah merupakan variabel dikotomi yang terbagi menjadi kategori 1 jika kinerja keuangan daerah surplus dan 0 jika kinerja keuangan daerah defisit dan tidak memerlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, *leverage*, jumlah anggota legislatif, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan daerah. Adapun model analisis regresi logistik dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Log} \left(\frac{P}{1-P} \right) = \alpha + \beta_1 \text{UPD} + \beta_2 \text{LEV} + \beta_3 \text{JAL} + \beta_4 \text{PAD} + \beta_5 \text{DAU} + \beta_6 \text{BD} + \beta_7 \text{TA}$$

BPK + e

Keterangan:

P: Probabilitas variabel dependen yang mampu dijelaskan variabel independen

Y= 1, Jika kinerja keuangan daerah surplus

Y= 0, Jika kinerja keuangan daerah defisit

α = konstanta

β = koefisien regresi

UPD	= Ukuran pemerintah daerah
LEV	= <i>Leverage</i>
JAL	= Jumlah anggota legislatif
PAD	= Kekayaan daerah
DAU	= Ketergantungan pada pusat
BD	= Belanja Daerah
TA BPK	= Temuan Audit
e	: Error, Variabel gangguan

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji *Wald*. Menurut Latan (2014:222-223), *Wald* statistik digunakan untuk menguji statistik signifikan dari individual koefisien. *Wald* statistik serupa dengan t-statistik pada regresi linier yang dihitung dengan membagi nilai beta koefisien dengan standar *error*. Analisis ini dilakukan untuk menentukan pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat yang bersifat dikotomi atau variabel yang memiliki dua alternatif jawaban yaitu kinerja keuangan surplus dan kinerja keuangan defisit. Uji *Wald* yang digunakan dalam model regresi logit ini samadengan uji hipotesis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Pada uji *Wald* digunakan untuk menguji variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, *leverage*, Jumlah anggota legislatif, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah dan temuan audit apakah masing-masing berpengaruh kinerja keuangan daerah. Langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji *Wald* sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis

H_{01} = Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a1} = Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{02} = *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a2} = *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{03} = Jumlah anggota legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a3} = Jumlah anggota legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{04} = Kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a4} = Kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{05} = Ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a5} = Ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{05} = Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a5} = Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{05} = Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

H_{a5} = Temuan Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

b. Menetapkan tingkat signifikansi (α)

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Pemilihan tingkat signifikansi didasarkan pada tingkat signifikansi yang menguntungkan.

c. Menentukan kriteria pengujian

Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_0 diterima

Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak

d. Menarik kesimpulan

Jika $p\text{-value}$ (dalam hal ini adalah *sig -2 tailed*) $> 0,05$

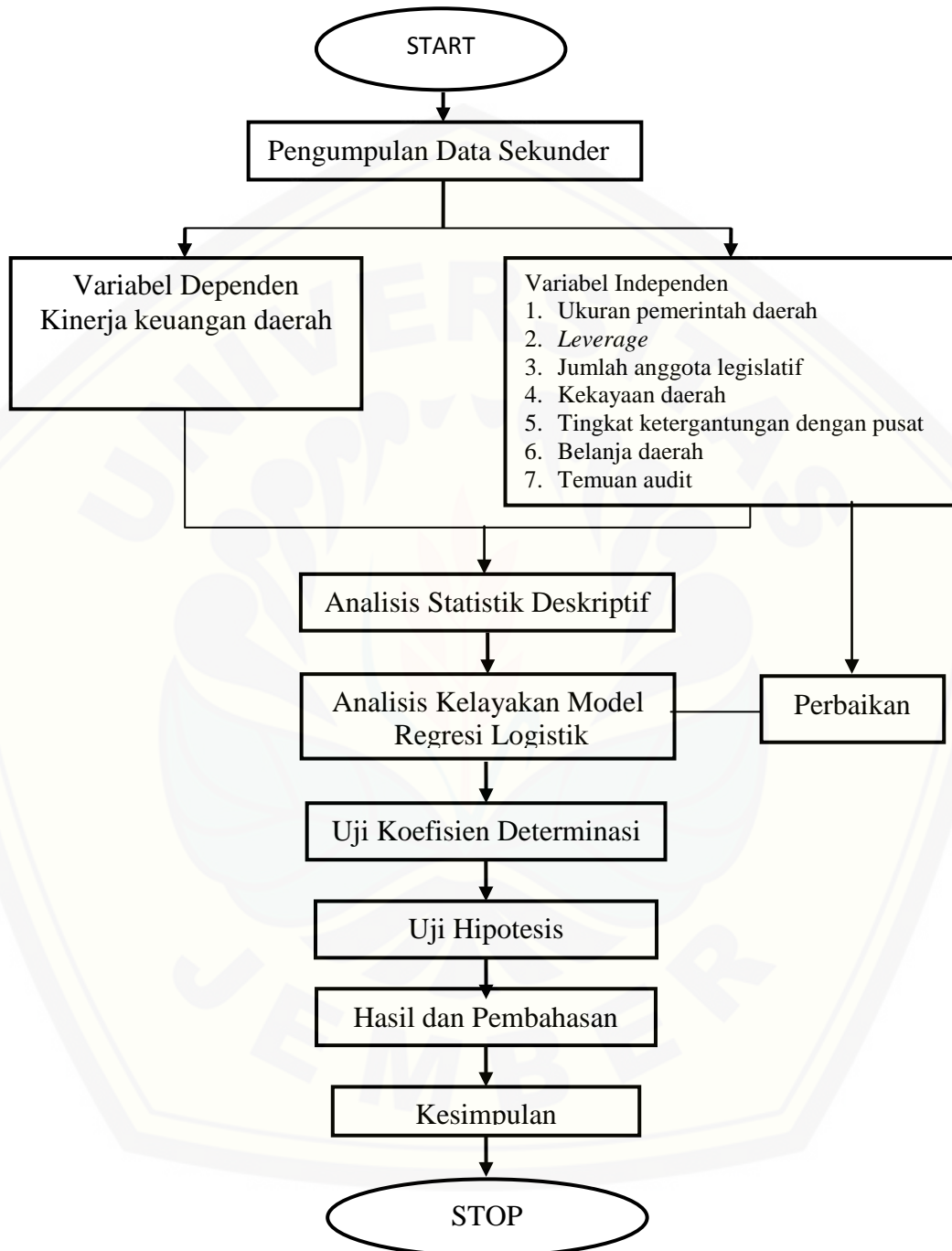
H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Jika $p\text{-value}$ (dalam hal ini *sig -2 tailed*) $< 0,05$

H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan Kerangka Pemecahan Masalah:

1. Start;
2. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data sekunder

3. Menentukan variabel independen (Y) yaitu kinerja keuangan daerah, kemudian menentukan variabel independen (X) yaitu ukuran pemerintah daerah, *leverage*, Jumlah anggota legislatif, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, belanja daerah dan temuan audit
4. Melakukan analisis statistik deskriptif;
5. Melakukan analisis kelayakan model regresi logistik yang menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* untuk mengetahui model sesuai dengan nilai observasinya;
6. Melakukan uji hipotesis dengan menggunakan metode *Wald* untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial
7. Kesimpulan dapat ditarik berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan dan disesuaikan dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian;
8. Stop, mengakhiri penelitian.

- f. Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pengeluaran Pemda lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Temuan audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan audit BPK dalam penelitian ini merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah terhadap ketentuan pengendalian intern. Pengaruh yang tidak signifikan dapat terjadi karena temuan audit BPK atas kasus kelemahan SPI tidak serta merta menjurus kepada kerugian negara. Disamping itu temuan ini tidak memperhatikan apakah kegiatan pemerintah tersebut telah sesuai dengan sasaran namun hanya memperhatikan ketidaksesuaian kegiatan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan dengan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini beberapa saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti selanjutnya, penelitian ini terbatas pada tahun 2015 dan hanya berfokus pada beberapa variabel yang dijadikan parameter. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode data lima tahun. Penggunaan variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan seperti tipe pemerintah daerah.
- b. Bagi Akademisi agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan dalam mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan objek yang diteliti atau menambah fokus penelitian dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada. Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja. Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, No. 2
- Adi Nugroho, Rahman, dan Zulaikha. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)”. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1 No 2.
- Azhar Susanto. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Gramedia
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit. Erlangga. Jakarta.
- Benhart, S. W., dan Rosenstein S., 1998, Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis, Financial Review 33, pp. 1-16.
- Choiriyah, 2010. Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia. Surakarta. (Skripsi Tidak dipublikasikan)
- Eisenhardt, Kathleem. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. Academy of Management Review, 14. Hal 57-74.
- Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan. Ekonomi. Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik II Badan Litbang. Departemen Dalam Negeri. Bidakara, 2-3 Juni 2009
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Gilligan, Thomas. W., dan Matsusaka, John. G. 2001. Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. *National Tax Journal*. Vol. 54: 57-82.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance Measurement in The Public Sector: The German Experience. *Emerald Research*, Vol. 54: 551-567.
- Gudono, 2014, Analisis Data Multivariat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hadi, Abdul, Hendri, Sapto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Penelitian Keuangan Akuntansi Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri. Bidakara, 2-3 Juni 2009
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hendriyadi, Sigit. 2011. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara Tahun 2008-2009. *Skripsi: Universitas Diponegoro*. Semarang
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal*. Universitas Riau.
- Julitawati et al. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.1 No. 1. Hal 15-29.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1. ISSN: 2252-6765.
- Latan, Hengky. 2014. Aplikasi Analisis Data Statistik Untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit. ANDI, Yogyakarta.

- Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. 2011. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XXIV.
- Mustikarini, Widya Astuti. Debby Fitriyani. 2012 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Skripsi*. Universitas Indonesia
- Nordiawan, Deddy dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University
- Perwitasari, Citra. 2010. The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Sadjiarto, Arja. 2000. "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja pemerintahan, Jurnal. Akuntansi & Keuangan, yor.2, No. 2, Nopember 2000: 13g - 150.
- Sekaran, Uma. 2000. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sekaran, 2006, Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa). *Accounting Analysis Journal*. Volume 1. No 1
- Sudarmadji dan Lana Sularto, 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas. Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT*, Vol 2

- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, dan Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, Volume 8, Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sebelas.
- Surepno, 2013. "Pengaruh Return on Equity (ROE), Ukuran (size), dan Kemakmuran (wealth) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia". Universitas Negeri Semarang : *Skripsi*
- Susanti, Rika. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Go Public yang Listed Tahun. 2005-2008). *Skripsi*. Universitas Diponegoro:
- Sutaryo., 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, Sesi I/11, September.
- Suyono, Eko. 2010. *Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Virgasari, Aviva. 2009. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokai Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang
- Weill, L. 2003. "Banking efficiency in transition economies: The role of foreign ownership". *Economics of Transition*, 11(3), 569–592/55 (9) 911-932.

Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Penelitian Simposium Nasional Akuntansi X. Universitas Sebelas Maret

Wiratraman, R. Herlambang Perdana.2009. Paradigma Hukum dan. Demokratisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. www.google.com.

Yu Frank. 2006. "Corporate Governance and Earnings Management". Working Paper.

Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat

